

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pendidikan Inklusif

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, perluasan akses pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh warga negara, serta upaya mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.¹

Istilah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang kini digunakan dalam dunia pendidikan, sebelumnya menggunakan istilah anak berkelainan atau anak luar biasa. Namun, kedua istilah tersebut terkesan mendiskriminasi anak sehingga tampillah istilah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dinilai lebih tepat dan terkesan positif.

Efendi dalam bukunya *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* mendefinisikan bahwa anak berkelainan atau anak luar biasa ialah “anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan dari rata-rata anak normal dalam aspek fisik, mental, dan sosial, sehingga untuk pengem-

¹ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 24-25.

bangun potensinya perlu layanan pendidikan khusus sesuai dengan karakteristiknya.”²

Sejalan dengan pengertian di atas, Direktorat PSLB mendefinisikan bahwa

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan/perkembangannya secara signifikan mengalami ke-lainan/penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosi-onal) dibanding dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.³

Adapun sifat anak berkebutuhan khusus (ABK) meliputi tiga kategori, antara lain:

- a. Anak berkebutuhan khusus permanen, yakni anak-anak yang memiliki kelainan tertentu dalam dirinya, seperti tunanetra, dan sebagainya.
- b. Anak berkebutuhan khusus temporer, yakni anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan, seperti terkena kerusuhan, bencana alam, perbedaan gaya bahasa, dan isolasi budaya.
- c. Kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak.⁴

Anak berkebutuhan khusus (ABK) dikelompokkan menjadi enam kelompok, antara lain:

- a. Anak dengan gangguan penglihatan (Tunanetra)
 - 1) Anak kurang awas (*low visions*).
 - 2) Anak tunanetra total (*totally blind*).

² Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 26.

³ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pengembangan Kurikulum Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 5.

⁴ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 3.

- b. Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara (Tunarungu-wicara)
 - 1) Anak kurang dengar (*hard of hearing*).
 - 2) Anak tuli (*deaf*).
- c. Anak dengan kelainan kecerdasan
 - 1) Anak dengan gangguan kecerdasan intelektual di bawah rata-rata
 - a) Anak tunagrahita ringan (IQ 50-70).
 - b) Anak tunagrahita sedang (IQ 25-49).
 - c) Anak tunagrahita berat (IQ 25-ke bawah).
 - 2) Anak dengan kemampuan intelegensi di atas rata-rata
 - a) Gifted dan genius, yaitu anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata.
 - b) *Talented*, yaitu anak yang memiliki keterbatasan khusus.
- d. Anak dengan gangguan anggota gerak (Tunadaksa)
 - 1) Anak layuh anggota gerak tubuh (polio).
 - 2) Anak dengan gangguan fungsi syaraf otak (*celebral palcy*).
- e. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi (Tunalaras)
 - 1) Anak dengan gangguan perilaku
 - a) Anak dengan gangguan perilaku taraf ringan.
 - b) Anak dengan gangguan perilaku taraf sedang.
 - c) Anak dengan gangguan perilaku taraf berat.
 - 2) Anak dengan gangguan emosi
 - a) Anak dengan gangguan emosi taraf ringan.
 - b) Anak dengan gangguan emosi taraf sedang.
 - c) Anak dengan gangguan emosi taraf berat.

- f. Anak dengan gangguan belajar spesifik
 - 1) Anak lamban belajar (*slow learner*)
 - 2) Anak autis
 - 3) Anak ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.⁵

Penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut:

- a. Bagian A adalah sebutan untuk kelompok anak tunanetra.
- b. Bagian B adalah sebutan untuk kelompok anak tunarungu.
- c. Bagian C adalah sebutan untuk kelompok anak tunagrahita.
- d. Bagian D adalah sebutan untuk kelompok anak tunadaksa.
- e. Bagian E adalah sebutan untuk kelompok anak tunalaras.
- f. Bagian F adalah sebutan untuk kelompok anak superior (berkemampuan di atas rata-rata).
- g. Bagian G adalah sebutan untuk kelompok anak tunaganda.⁶

Pendidikan inklusif menurut Direktorat PSLB dalam dokumen pedoman penyelenggaraan inklusif ditegaskan bahwa

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan individu peserta didik tanpa membeda-bedakan anak yang berasal dari latar belakang etnik/suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, afiliasi politik, bahasa, geografis, tempat tinggal, jenis kelamin, agama/kepercayaan, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. Dalam kebersamaan tersebut, perlu ada penyesuaian komponen-komponen pendidikan terhadap kebutuhan khusus peserta didik.⁷

⁵ Ibid., 4-5.

⁶ Efendi, *Pengantar Psikopedagogik*, 11.

⁷ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pengembangan Kurikulum*, 1.

Takdir Ilahi mengutip O'Neil yang mendefinisikan pendidikan inklusif dalam bukunya Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi bahwa

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat dan di kelas reguler bersama-sama teman lainnya (anak normal) seusianya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Model pendidikan seperti ini berupaya memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua anak, memiliki akses yang sama ke sumber-sumber belajar yang tersedia, serta sarana yang dibutuhkan terpenuhi dengan baik. Maka, tak berlebihan jika sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang ramah inklusif dan mencapai "pendidikan untuk semua" (*education for all*).⁸

Direktorat PSLB meresmikan pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Hal ini menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.⁹

Pendidikan inklusif tidak boleh terfokus pada kekurangan dan keterbatasan anak berkebutuhan khusus, tetapi harus mengacu pada kelebihan dan potensinya agar lebih berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturasi sekolah yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan khusus anak sehingga dapat menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan.¹⁰

⁸ Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 27.

⁹ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen, 2007), 4.

¹⁰ Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 28-29.

Di dalam karakteristik pendidikan inklusif, paling tidak terdapat beberapa poin penting yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri anak berkebutuhan khusus dengan tingkat kecerdasan dan intelektual mereka. Selain itu, poin-poin tersebut juga mencermati prinsip fleksibilitas di berbagai bidang untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang dianggap *difabel* (*different ability*). Adapun beberapa poin tersebut, yaitu:

a. Kurikulum yang fleksibel

Pemberian materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi psikologis ABK, terutama keterampilan dan potensi pribadi mereka. Jadi, tidak ada penekanan untuk menguasai sejumlah materi pelajaran, sebab kepedulian terhadap hak dan kebutuhan ABK yang masih membutuhkan bimbingan, motivasi, dan pengawasan yang lebih tinggi dibanding anak normal lainnya merupakan bagian dari penghayatan nilai-nilai kemanusiaan yang mesti dijunjung tinggi.

b. Pendekatan pembelajaran yang fleksibel

Pendekatan pembelajaran yang bersifat fleksibel berguna untuk memberikan kemudahan ABK dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi dan keterampilan yang sesuai tingkat kemampuan mereka demi membangun masa depan yang cerah.

c. Sistem evaluasi yang fleksibel

Sistem evaluasi/penilaian disesuaikan dengan kriteria ABK, yakni memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ABK dengan anak normal pada umumnya. Sebab, ABK memiliki tingkat kemampuan lebih rendah dibandingkan dengan anak normal pada umumnya.

d. Pembelajaran yang ramah

Pembelajaran yang ramah mampu membuat anak semakin termotivasi untuk terus mengembangkan potensi dan kecakapan (*skill*) mereka sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, ABK juga semakin terdorong untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini dikarenakan komponen utama yang paling dibutuhkan oleh ABK adalah keramahan yang menunjukkan kondisi penerimaan terhadap diri mereka.¹¹

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
- c. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
- d. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.
- e. Memenuhi amanat dari dasar hukum negara Indonesia sebagaimana termaktub pada UUD 1945, khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat 2 yang berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”¹²

¹¹ Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 45-48.

¹² Direktorat Pembinaan, *Pedoman Umum*, 10-11.

Dari penjabaran terkait pengertian, karakteristik, serta tujuan pendidikan inklusif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu sistem layanan pendidikan yang berorientasi pada persamaan hak dalam memperoleh pendidikan di sekolah reguler bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Praktiknya, layanan pendidikan bagi ABK disejajarkan sebagaimana anak-anak normal sebayanya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki mereka. Adapun kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem evaluasinya bersifat ramah, fleksibel, serta disesuaikan dengan kondisi fisik, mental, tingkat kecerdasan dan intelektual mereka.

2. Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusif

Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai oleh negara-negara Scandinavia, yakni Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pada tahun 1960-an, Presiden Amerika Serikat Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Scandinavia untuk mempelajari *mainstreaming* dan *Least restrictive environment* yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat.

Selanjutnya, pada tahun 1991 di Inggris mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya konferensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi *education for all*. Implikasi dari

statemen ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa terkecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan secara memadai.

Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konferensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan *the Salamanca statement on inclusive education*. Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konferensi nasional dengan menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.

Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit tinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukit tinggi yang isinya ialah menekankan perlunya terus mengembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara untuk menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan serta pemeliharaan yang berkualitas dan layak.

Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu pada tahun 1980-an, tetapi kurang berkembang, sehingga sistem ini dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia melalui konsep pendidikan inklusif.¹³

¹³ Direktorat Pembinaan, *Pedoman Umum*, 9-10.

3. Landasan Pendidikan Inklusif

Ada beberapa landasan pendidikan inklusif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), antara lain: landasan filosofis, landasan religius, landasan yuridis, landasan pedagogis, dan landasan empiris yang akan dipaparkan sebagaimana berikut.

a. Landasan Filosofis

- 1) Pancasila yang terdiri dari 5 sila sebagai ideologi negara Indonesia.
- 2) Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna kesatuan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia dengan tanpa membedakan perbedaan fisik, mental, suku, ras, bahasa, budaya, maupun agama.¹⁴

b. Landasan Religius/spiritual

- 1) QS. An-Nisa' (4) ayat 9



Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang

yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya.”¹⁵

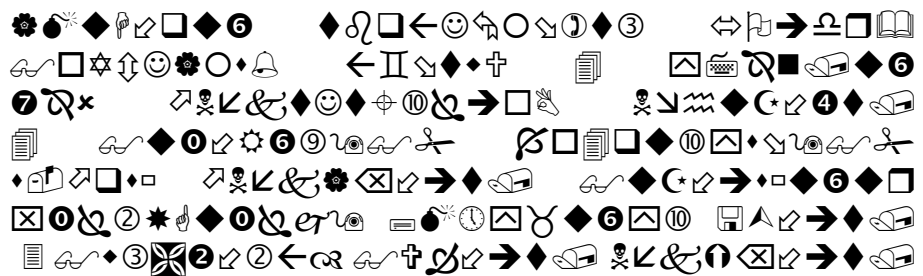
Ayat ini mengajarkan bahwa semua manusia harus saling menghormati, toleransi, dan tidak boleh saling merendahkan, termasuk perlakuan manusia normal terhadap manusia yang memiliki kebutuhan khusus pada dirinya. Di samping itu, ayat ini juga mengisyaratkan agar manusia tidak menelantarkan generasi/

¹⁴ Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 72-75.

¹⁵ al-Qur'an, 4 (An-Nisa'): 9.

keturunannya sehingga terjebak dalam ketidakberdayaan di masa depan, baik karena faktor ekonomi, pengetahuan, keterampilan, maupun seluruh aspek kehidupan. Jadi, dengan adanya pendidikan inklusif, diharapkan semua anak mampu mengaktualisasikan seluruh potensinya sebagai bekal kehidupan dimasa mendatang.

2) QS. Az-Zuhruf (43) ayat 32



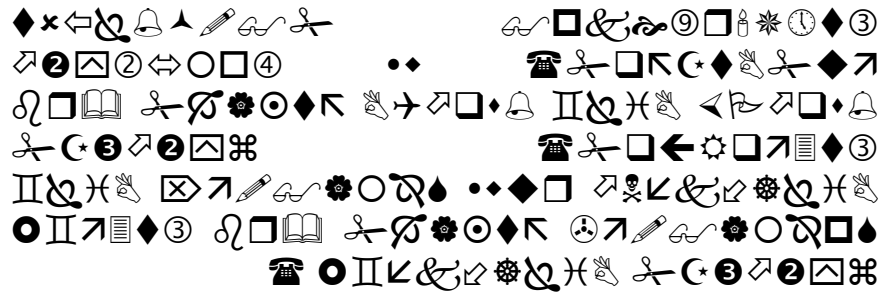
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat

Tuhanmu?. Kami (Allah) telah menentukan di antara mereka (manusia) penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat saling mengambil manfaat (membutuhkan).”¹⁶

Apabila dikaitkan kehidupan dunia dan pendidikan inklusif, kata derajat dalam ayat di atas, dapat diartikan dengan keberuntungan yang dimiliki manusia normal. Maka, mereka harus memberikan perhatian, kepedulian, dan toleransinya kepada orang lain yang berkebutuhan khusus agar dapat tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang.

3) QS. Al-Hujurat (49) ayat 11

¹⁶ al-Qur’an, 43 (Az-Zukhruf): 32.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah

sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.”¹⁷

Kaitan ayat tersebut dengan pendidikan inklusif, yakni himbauan bagi manusia normal untuk tidak merendahkan manusia berkebutuhan khusus. Sebab, tidak tentu mereka yang normal lebih baik dan terjamin kecerahan masa depannya dari pada mereka yang berkebutuhan khusus. Oleh karena potensi manusia berbeda-beda, dapat kita lihat banyak orang yang berkebutuhan khusus sukses dalam kehidupannya, salah satunya adalah Albert Einstein, ilmuwan fisika terbesar di abad ke-20 dan peraih penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1921 yang menyandang disleksia.

4) Hadis riwayat Ahmad

¹⁷ al-Qur’an, 49 (Al-Hujurat): 11.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . (رواه أحمد)¹⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ja'far telah menceritakan kepada kami Yazid bin Al Asham dari Abu Hurairah, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla tidak melihat bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amalan kalian." (HR. Ahmad).

Makna hadis tersebut jika dikaitkan dengan pendidikan inklusif menunjukkan bahwa adanya konsep universal dalam Islam yang memandang seluruh manusia adalah sama tanpa memandang latar belakang fisik, keluarga, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Namun, yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah.

c. Landasan Yuridis

1) *Public Law* Amerika Serikat, IDEA (*Individuals with Disabilities Education Act*)

“Hak memperoleh pendidikan sejak lahir hingga berusia 21 tahun kepada setiap orang yang mengalami hambatan kognitif, emosi atau fisik, yaitu bebas memperoleh pendidikan yang sesuai, menjalani evaluasi yang *fair* dan tidak diskriminatif, memperoleh pendidikan dengan suasana yang tidak mengekang, memperhatikan

¹⁸ Muslim, *Kitāb al-Bir wa'l-Sjilati wa'l-Ḥudūd* (Beirut: Dār al-Kitāb, t.t.), IV, 1987.

kekhususan setiap individu program pendidikan, dan menghargai hak asasi individu.”¹⁹

2) Deklarasi Salamanca tentang Pendidikan Inklusif tahun 1994

*“The development of inclusive schools as the most effective means for achieving education for all”*²⁰ Kesepakatan ini mengumandangkan tentang perkembangan sekolah inklusif sebagai hal yang sangat efektif untuk meraih keberhasilan pendidikan untuk seluruh manusia.

3) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 11 dan 12

Pasal 11 yang berbunyi “setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya” dan pasal 12 yang berbunyi “setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan kecacatan serta kemampuannya.”²¹

4) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 5 ayat (1)

¹⁹ J.E. Ormrod, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 2008), 228-230.

²⁰ Lebih detailnya lihat dokumen *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* (7-10 Juni 1994), 41.

²¹ Lebih lengkapnya lihat *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*. t.t.: t.p., t.t.

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”²²

5) Deklarasi Bandung 2004 “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif”

“Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan.”²³

6) Surat Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003

“Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK.”²⁴

d. Landasan Pedagogis

Sebagaimana pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”²⁵ Selain itu, juga mengacu pada UUD’45 dalam Bab X tentang HAM (hak asasi manusia) pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi, “setiap anak

²²Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) (Jakarta: SL Media, 2011), 12.

²³ Lebih detail lihat Lokakarya Nasional dengan tema “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” yang diselenggarakan di Bandung, 8-14 Agustus 2004.

²⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar pada “Kebijakan Peningkatan Layanan Melalui Pendidikan Inklusif” (Maret 2012).

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, 11-12.

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁶

Dengan demikian, maka pelaksanaan pendidikan inklusif bagi ABK akan semakin berkembang dan terlaksana sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan inklusif. Maka, akan terciptalah individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Selain itu, ABK akan dicetak menjadi manusia potensial yang tangguh dalam menghadapi kehidupannya di masa depan.²⁷

e. Landasan Empiris

Landasan empiris mengacu pada penelitian/riset tentang pendidikan inklusif yang telah banyak diselenggarakan oleh banyak negara. Penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *The National Academy Of Sciences* dari Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan ABK di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat sesuai karakteristik mereka yang sangat heterogen.

Beberapa pakar penelitian kemudian mengadakan metaanalisis (analisis lebih lanjut) terhadap beberapa hasil penelitian yang sejenis terkait pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif, baik

²⁶ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Surabaya: Anugerah, t.t.), 78.

²⁷ Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 79.

terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkebutuhan khusus dan teman-teman sebayanya.²⁸

Apabila kita cermati dengan teliti, baik landasan filosofis, landasan religius, landasan yuridis, landasan pedagogis, maupun landasan empiris, telah dicantumkan secara jelas terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif yang mana memang merupakan sebuah kebutuhan yang perlu segera dilaksanakan secara universal di sekolah-sekolah reguler.

4. Model-model Pendidikan Inklusif

Pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) di Sekolah Inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model kelas sebagai berikut:

- a. Kelas reguler (inklusif penuh), ABK belajar bersama dengan anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
- b. Kelas reguler dengan *cluster*, ABK belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus.
- c. Kelas reguler dengan *pull out*, ABK belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus/GPK.
- d. Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull Out*, ABK belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu belajar dengan GPK di ruang yang khusus pula.

²⁸ Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Sesuai Permendiknas No. 7 Tahun 2009* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 6-7.

- e. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, ABK belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler.
- f. Kelas khusus penuh, ABK belajar di kelas khusus di sekolah reguler.²⁹

Dari berbagai model kelas yang ditawarkan dalam pendidikan inklusif, fokus yang terpenting adalah kelas inklusif ramah pembelajaran, yakni kelas dengan guru yang mampu memahami dan menghargai nilai-nilai perbedaan, serta membimbing dan mendidik seluruh anak dengan beragam latar belakang, bentuk fisik, kecerdasan, emosional, sosial atau karakteristik lain agar dapat mengenyam pendidikan di sekolah.³⁰ Dengan demikian, diskriminasi layanan pendidikan dapat terminimalisir.

B. Konsep Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Setting Inklusif

1. Pengertian Sistem Pembelajaran PAI dalam Setting Inklusif

Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah “susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.”³¹

²⁹ Syafrida Elisa dan Aryani Tri Wrastari, “Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau Dari Faktor Pembentukan Sikap,” *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 01, (Februari, 2013), 3.

³⁰ Tulkit LIRP, *Disiplin Positif dalam Kelas Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran* (Jakarta: IDPN Indonesia, 2006), 12.

³¹ Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 503. Makna dari kata “Sistem” berbeda dengan makna dari kata “Manajemen” yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *Manage* dengan arti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Lihat John. M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2010), 372. Senada dengan arti tersebut, Risa Agustin dalam kamus ilmiahnya menjabarkan arti kata “Manajemen” yakni pengelolaan/kepengurusan/ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Lihat Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Serba Jaya, t.t), 303. Jadi,

Secara lebih rinci, Wina Sanjaya dalam bukunya *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran* mengatakan bahwa

Sistem bukanlah cara/metode seperti yang banyak dikatakan orang. Cara hanyalah bagian kecil dari suatu sistem. Jadi, sistem adalah kesatuan komponen yang satu sama lain saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada tiga ciri utama suatu sistem, yaitu: 1) Memiliki tujuan tertentu; 2) Untuk mencapai tujuan, harus memiliki fungsi-fungsi tertentu; 3) Untuk menggerakkan fungsi, harus ditunjang oleh berbagai komponen.³²

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan dari serangkaian subsistem/unsur/komponen yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan antara satu sama lainnya untuk melakukan sesuatu agar mampu mencapai suatu tujuan tertentu. Apabila ada subsistem yang tidak berjalan sesuai fungsinya, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai secara maksimal.

Selanjutnya membahas tentang pengertian dari kata pembelajaran. Sebagaimana diketahui bahwa kata pembelajaran berasal dari kata kerja belajar yang memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kemudian diberi imbuhan pe-an sehingga menjadi kata pembelajaran yang bermakna proses atau cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.³³

Menurut Novan Ardy, pembelajaran ialah “proses menjadikan orang agar mau belajar dan mampu (kompeten) melalui berbagai pengalamannya agar tingkah lakunya dapat berubah menjadi lebih baik

menurut penulis, perbedaan antara makna kata keduanya [kata sistem dan kata manajemen] bahwa “sistem merupakan kesatuan dari rangkaian beberapa komponen/unsur/perangkat, sedangkan manajemen adalah pengelolaan/pengaturan/pengurusan/ ketatalaksanaan dari sistem tersebut.”

³² Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 1-2.

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline*. <http://ebsoft.web.id>.

lagi.”³⁴ Sedangkan Wina Sanjaya dalam bukunya *Perencanaan dan Desain*

Sistem Pembelajaran mengartikan bahwa

Pembelajaran adalah proses kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan semua sumber dan segala potensi yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.³⁵

Secara lebih luas, Uzer Usman memberikan pengertian dari pembelajaran dalam bukunya *Menjadi Guru Profesional* bahwa

Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar-mengajar. Jadi, bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran saja, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.³⁶

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan mengandalkan segala sumber belajar yang ada dan mengerahkan semua potensi yang dimiliki untuk merubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu.

Dari gabungan kata sistem dan kata pembelajaran di atas, Dewi Salma dalam bukunya *Prinsip Desain Pembelajaran* menjelaskan bahwa

Sistem pembelajaran terdiri atas beberapa subsistem, yaitu komponen-komponen pembelajaran yang mana masing-masing bergerak dan bekerja sama agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

³⁴ Novan Ardy Wiyani, *Desain Pembelajaran Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 20.

³⁵ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain*, 26.

³⁶ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 4.

Seandainya salah satu dari komponen tersebut terhambat, maka akan berdampak terhadap proses belajar. Dengan demikian, tujuan belajar tidak tercapai.³⁷

Adapun terkait komponen dari sistem pembelajaran, Pupuh dan Sobry dalam bukunya *Strategi Belajar Mengajar* merangkai sejumlah komponen pembelajaran yang meliputi “tujuan pembelajaran, bahan/materi pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode pembelajaran, alat/media pembelajaran, sumber pelajaran, dan evaluasi pembelajaran.”³⁸

Sedangkan Wina Sanjaya dalam bukunya *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* menyebutkan bahwa “komponen-komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media dan evaluasi.”³⁹

Mengenai pendidikan (*tarbiyyah*), al-Bani yang dikutip oleh al-Nahlawi dalam Ahmad Tafsir memaparkan bahwa

Pendidikan terdiri atas empat unsur, yaitu: 1) memelihara fitrah anak menjelang *balig*; 2) mengembangkan seluruh fitrah/potensi; 3) mengarahkan seluruh fitrah/potensi menuju kesempurnaan; dan 4) dilaksanakan secara bertahap. Jadi, pendidikan adalah pengembangan seluruh potensi anak didik secara bertahap.⁴⁰

Kemudian pengertian agama menurut Abdul Qadir Ahmad dalam bukunya *Metodologi Pengajaran Agama Islam* yakni

Agama (*ad-din*) adalah sistem kehidupan yang lengkap menyangkut berbagai aspek kehidupan termasuk akidah, akhlak, ibadah, dan amal perbuatan yang diisyaratkan Allah untuk manusia. Manusia diperintahkan untuk mengamalkan dan memedomannya

³⁷ Dewi Salma Prawiradilaga, *Prinsip Disain Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 28.

³⁸ Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 13.

³⁹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), 58.

⁴⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 29.

dengan rasa tunduk dan patuh kepada-Nya. Dan Allah membalas kepatuhannya atau keingkaran terhadap sistem ini.⁴¹

Adapun mengenai definisi Islam itu sendiri, Rois Mahfud dalam bukunya *Al-Islam: Pendidikan Agama Islam* memaparkan bahwa

Kata Islam merupakan turunan dari kata *assalmu, assalamu, assalamatu* yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Islam berarti suci dan bersih tanpa cacat. Selain itu, Islam berarti menyerahkan sesuatu. Jadi, Islam adalah memberikan dan mempercayakan keseluruhan jiwa raga seseorang kepada Allah.⁴²

Lebih lanjut mengenai Islam, Ahmad Taufiq dalam bukunya *Pendidikan Agama Islam* mengemukakan bahwa

Islam adalah agama samawi terakhir yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi Muhammad melalui ajaran-ajaran yang terdapat pada kitab al-Qur'an dan as-Sunnah dalam bentuk perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat yang disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Islam adalah agama yang bersifat universal dan *rahmah li al-'alamin*. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan menuntunnya dalam berhubungan dengan sesamanya dan alam semesta.⁴³

Adapun secara keseluruhan, pengertian pendidikan agama Islam menurut Abdul Majid dalam bukunya *Belajar dan Pembelajaran PAI* yakni “usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”⁴⁴ Untuk lebih rincinya, dalam kurikulum PAI tertera bahwa

Pendidikan agama Islam ialah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam

⁴¹ Muhammad Abdul Qadir Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 3-4.

⁴² Rois Mahfud, *Al-Islam: Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), 3-4.

⁴³ Ahmad Taufiq, *Pendidikan Agama Islam* (Surakarta: Yuma Pustaka, 2011), 5.

⁴⁴ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2012), 13.

mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur'an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.⁴⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah segala upaya sadar dan terorganisasi dalam mempersiapkan para peserta didik untuk menjadi manusia yang berpegang teguh pada ajaran Islam dan mampu mewujudkan persatuan bangsa, sehingga tercipta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian dari sistem pembelajaran PAI⁴⁶ dalam *setting* inklusif adalah serangkaian perangkat pembelajaran PAI yang terorganisasi secara rapi dan teratur, serta saling berinteraksi dan berinterelasi dalam proses pembelajaran PAI untuk para siswa inklusif. Tujuannya agar dapat menuntaskan tujuan pembelajaran PAI dengan kompetensi yang diharapkan, serta mampu mengembangkan potensi mereka dalam bidang PAI secara optimal.

2. Dasar-dasar Pelaksanaan Sistem Pembelajaran PAI dalam *Setting* Inklusif

Ditilik dari keberadaannya, mata pelajaran PAI merupakan salah satu dari sekian mata pelajaran wajib di sekolah, termasuk pula pada sekolah inklusif. Karena posisinya sangat urgen, maka pelaksanaan

⁴⁵ Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Alfabeta, 2012), 201.

⁴⁶ Berbeda dengan manajemen pembelajaran PAI yang berarti pengelolaan dari sistem pembelajaran PAI. Menilik definisi dari manajemen pembelajaran PAI, yakni “proses pendayagunaan seluruh komponen pembelajaran PAI yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan program pengajaran PAI. Lihat makalah Ana Mustaqimatud Dina, “Komponen-komponen Manajemen Pembelajaran PAI.” Makalah disajikan dalam seminar perkuliahan Manajemen Pembelajaran PAI, Pascasarjana STAIN Kediri, 10 Oktober 2014.

pembelajaran PAI di sekolah memiliki landasan hukum yang sangat kuat ditinjau dari segi yuridis, religius dan psikologis.

a. Dasar Yuridis

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berpegangan dari perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Falsafah negara, pancasila sila 1 “Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁷
- 2) UUD’45 dalam Bab XI pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴⁸
- 3) UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang telah disahkan DPR RI pada 11 Juni 2003 dan diundangkan 8 Juli 2003 menunjukkan perkembangan signifikan tentang pendidikan Islam. Pemerintah telah melegalkan perkembangan institusi/kelembagaan Islam yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama Islam, baik berbentuk formal seperti Madrasah Diniyah Ula/Awwaliyah (MDU/A), Madrasah Diniyah Wustha (MDW), Madrasah Diniyah’Ulya (MDU), dan Ma’had Aly (MA) maupun berbentuk nonformal seperti Pesantren dan Majelis Ta’lim.⁴⁹

b. Dasar Religius

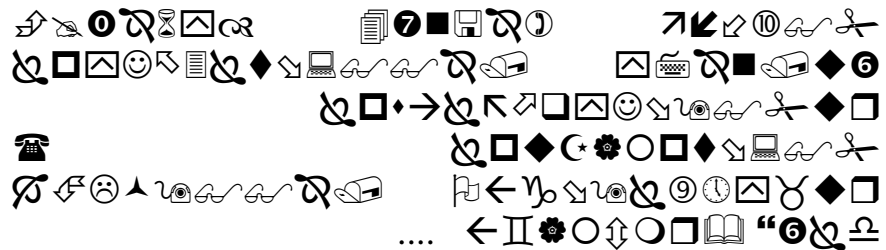
⁴⁷ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim* (Bandung: Rosdakarya, 2011), 4.

⁴⁸ *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Surabaya: Apollo Lestari, t.t., 21.

⁴⁹ Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonansi Guru sampai UU SISDIKNAS* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 140-141.

Dasar religius bersumber dari ajaran Islam yang merupakan perintah dari Tuhan dan perwujudan ibadah kepada-Nya.⁵⁰ Beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan perintah tersebut, di antaranya:

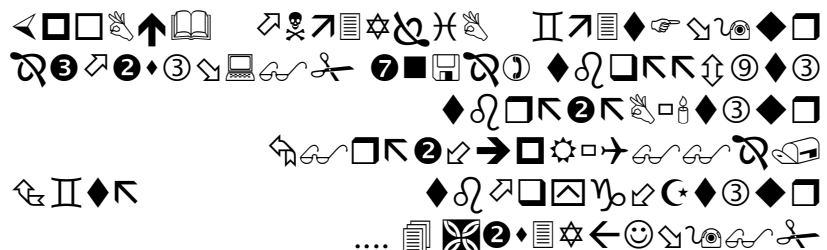
1) Q.S. an-Nahl (16) ayat 125



Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan

hikmah [Perkataan tegas dan benar yang dapat membedakan antara hak dan bathil], dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”⁵¹

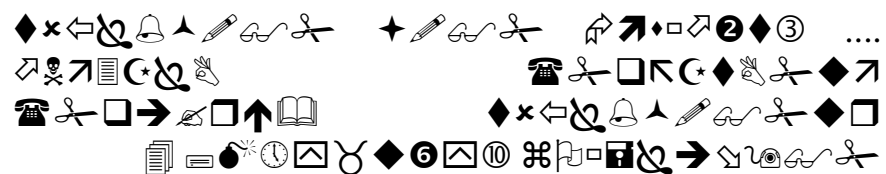
2) Q.S. Ali ‘Imran (3) ayat 104



Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan

umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar”⁵²

3) Q.S. al-Mujadalah (58) ayat 11



⁵⁰ Alim, *Pendidikan Agama Islam*, 5.

⁵¹ al-Qur'an, 16 (An-Nahl): 125.

⁵² al-Qur'an, 3 (Ali 'Imran): 104.

Artinya: “.... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu sebanyak beberapa derajat.”⁵³

c. Dasar Psikologis

Dasar psikologis yakni dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa manusia dalam hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenteram, sehingga memerlukan suatu pegangan hidup. Pegangan hidup tersebut ialah agama yang mana di dalamnya mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (vertikal) serta kepada sesama makhluk dan lingkungannya (horizontal).⁵⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan serangkaian sistem pembelajaran PAI di sekolah inklusif memiliki tiga dasar, yaitu: 1) dasar yuridis/hukum berupa Pancasila dan UUD’45; 2) dasar religius yang bersumber dari ajaran agama Islam, yakni ayat-ayat al-Qur’an; dan 3) dasar psikologis manusia, yakni agama sebagai pedoman kebahagiaan hidup manusia.

3. Fungsi dan Tujuan Sistem Pembelajaran PAI dalam *Setting* Inklusif

Muhaimin dikutip Nusa Putra dan Santi dalam bukunya Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam mengungkapkan bahwa

Pendidikan Agama Islam pada dasarnya menyentuh tiga aspek secara terpadu, yaitu: (1) *knowing*, agar para peserta didik dapat mengetahui dan memahami ajaran dan nilai-nilai agama; (2) *doing*, agar para peserta didik dapat mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai

⁵³ al-Qur’an, 58 (al-Mujadalah): 11.

⁵⁴ Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran PAI*, 203.

agama; dan (3) *being*, agar para peserta didik dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama.⁵⁵

Dalam tataran praktiknya, fungsi mata pelajaran PAI di sekolah inklusif, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.
- b. Penyaluran, yaitu menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal.
- c. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengamalan Islam.
- d. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan.
- e. Penyesuaian, yaitu membimbing dalam beradaptasi/menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat sesuai dengan ajaran Islam.
- f. Sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁵⁶

Adapun pelaksanaan mata pelajaran PAI di sekolah inklusif bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ditambah lagi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.⁵⁷

4. Ruang Lingkup Sistem Pembelajaran PAI dalam *Setting* Inklusif

⁵⁵ Nusa Putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 3.

⁵⁶ Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 103-104.

⁵⁷ *Ibid.*, 104.

Sistem pembelajaran merupakan suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

- a. Unsur manusiawi terdiri atas semua pihak pendukung keberhasilan proses pembelajaran, yaitu: siswa, guru, pustakawan, laboran, tenaga administrasi, komite sekolah bahkan mungkin penjaga kantin sekolah.
- b. Unsur material, yakni berbagai bahan pelajaran yang dapat disajikan sebagai sumber belajar. Misalnya: buku, film, foto, CD, dan lainnya.
- c. Unsur fasilitas dan perlengkapan, yakni segala sesuatu yang dapat mendukung terhadap jalannya proses pembelajaran. Misalnya: ruang kelas, penerangan, perangkat komputer, audio-visual, dan lain-lain.
- d. Prosedur untuk mencapai suatu tujuan, yakni seluruh kegiatan proses pembelajaran. Misalnya: strategi belajar, evaluasi, dan sebagainya.⁵⁸

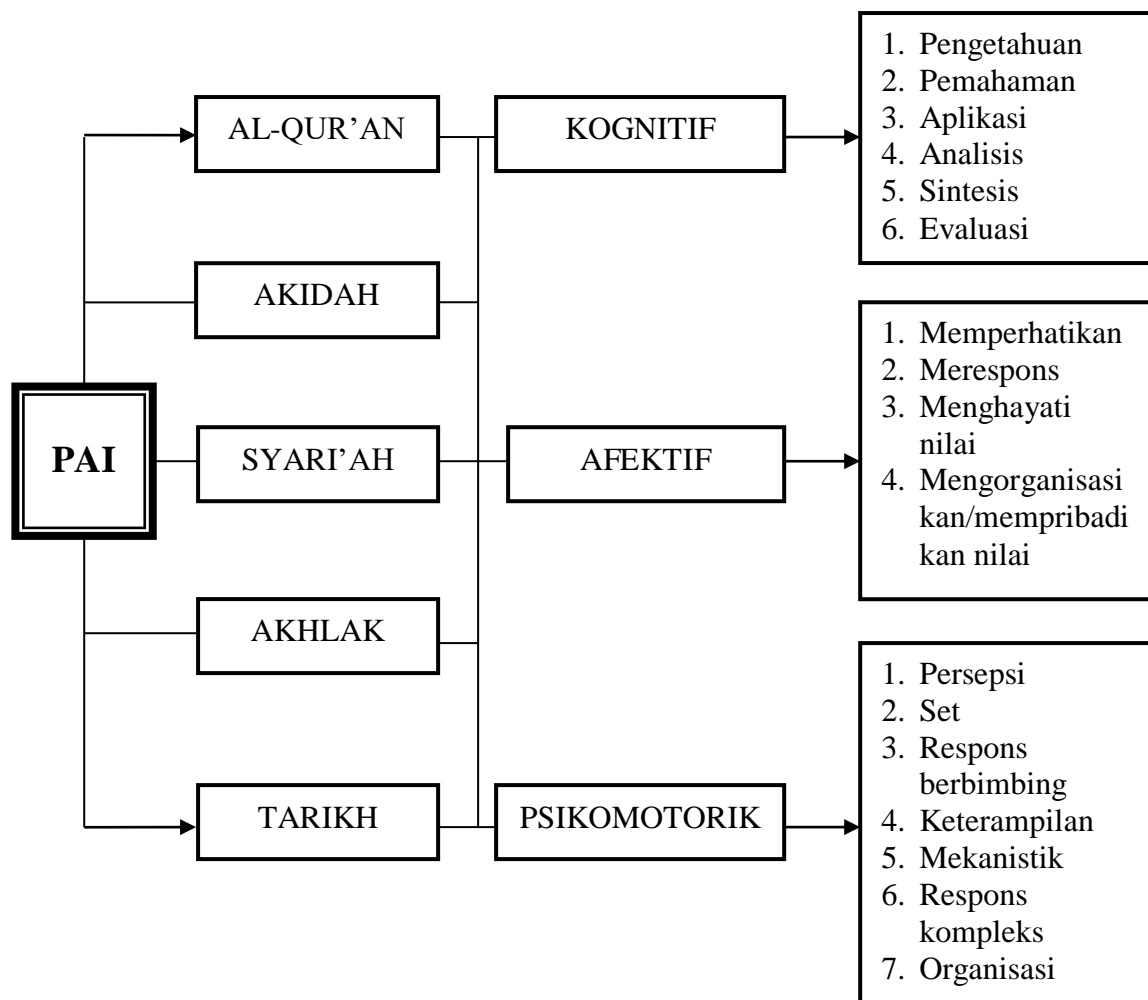
Sedangkan beberapa lingkup komponen yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program sekolah inklusif, antara lain:

- a. Sistem penerimaan siswa baru.
- b. Identifikasi siswa berkebutuhan khusus.
- c. Sistem pembelajaran fleksibel dengan kondisi dan kebutuhan siswa.
- d. Proses pembelajaran mulai persiapan hingga evaluasi dan tindak lanjut.
- e. Kelompok sasaran atau objek kegiatan.
- f. Waktu atau durasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- g. Jumlah biaya kegiatan dengan perincian penggunaannya.⁵⁹

⁵⁸ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain*, 6.

⁵⁹ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Program Tahunan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 6-7.

Adapun pemetaan komponen-komponen PAI disertai ranahnya, secara kompleks dipaparkan oleh Ramayulis yang dikutip yang dikutip Nusa Putra dan Santi dalam bukunya Penelitian Kualitatif PAI berikut.⁶⁰



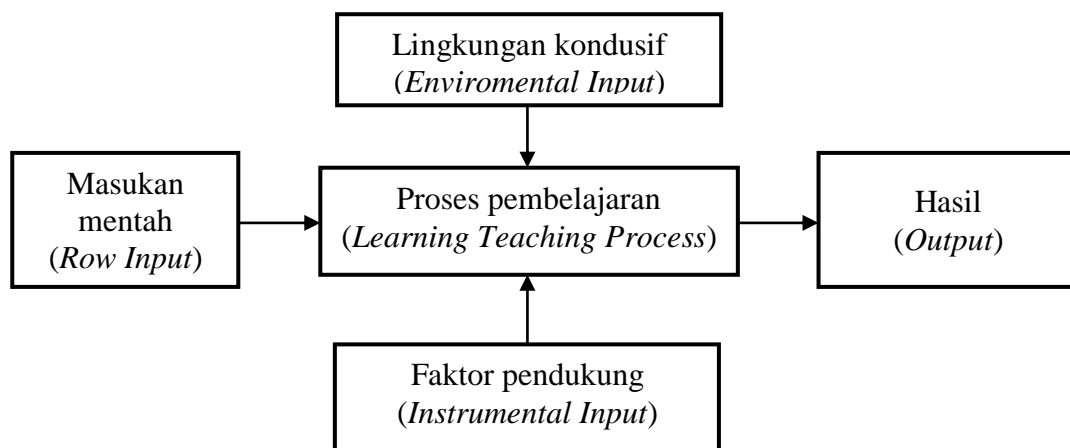
Gambar 2.1

Bagan komponen dan ranah PAI

Muhaimin sebagaimana dikutip oleh Munjin dan Lilik dalam bukunya Metode dan Teknik Pembelajaran PAI memaparkan alur sistem pembelajaran PAI yang dibingkai dalam sebuah bagan berikut.⁶¹

⁶⁰ Nusa dan Santi, *Penelitian Kualitatif PAI*, 2.

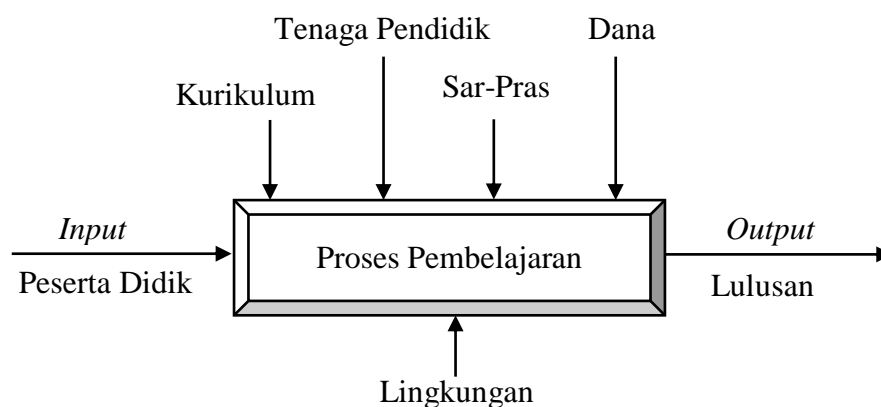
⁶¹ Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 23-24.



Gambar 2.2

Bagan alur sistem pembelajaran PAI

Sedangkan Direktorat PSLB mendeskripsikan sistem pembelajaran inklusif pada sebuah diagram berikut.⁶²



Gambar 2.3

Diagram sistem pembelajaran inklusif
Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disinergikan bahwa sistem pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dalam *setting* inklusif memiliki ruang lingkup yang terdiri dari *input*, tenaga pendidik, proses pembelajaran, lingkungan, faktor pendukung inklusif, serta *output*.

⁶² Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pedoman Manajemen dan Pembelajaran Sekolah Inklusif* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen, 2010), 4.

a. *Input*

Input yang dimaksud adalah anak didik. Faktor yang berpotensi mempengaruhi kualitas pembelajaran, di antaranya ialah kemampuan siswa, motivasi belajar, bakat dan minat, perhatian, sikap, serta kebiasaan belajar dan beribadah.⁶³ Kemampuan awal dan karakteristik siswa menjadi acuan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar, serta penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah inklusif. Beberapa faktor yang menjadi tolak ukurnya adalah kategori *input* siswa, kemampuan peserta didik ABK apabila mengikuti kelas reguler bercampur anak lainnya (anak normal), hasil identifikasi kebutuhan khusus siswa, alat identifikasi yang digunakan, dan orang-orang yang terlibat dalam proses identifikasi tersebut.⁶⁴

b. **Tenaga Pendidik**

Tenaga pendidik/guru merupakan unsur yang sangat urgen dalam proses pembelajaran di sekolah.

1) Guru kelas

Guru kelas adalah guru yang mengikuti kelas pada satuan pendidikan dasar (SD) atau sederajat yang bertugas melaksanakan seluruh mata pelajaran, kecuali pendidikan agama dan olahraga.

2) Guru bidang studi

Guru bidang studi atau guru mata pelajaran adalah guru yang bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan dasar atau sederajat.

⁶³ Munjin dan Lilik, *Metode dan Teknik*, 24.

⁶⁴ Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 182.

3) Guru pendidik khusus (GPK) atau disebut dengan guru *shadow*

Guru yang khusus menangani anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah inklusif disebut dengan istilah guru pendidik khusus (GPK)/guru *shadow*, yakni guru yang berkualifikasi sarjana (S1) pendidikan luar biasa (*ortopedagog*) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pendamping, serta bekerja sama dengan guru kelas atau guru bidang studi dalam memberikan assesmen dan menyusun program pengajaran individual. Oleh karena itu, GPK juga harus berlatar belakang pendidikan khusus atau guru reguler yang telah mendapatkan pelatihan secara memadai tentang layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.⁶⁵

Secara spesifik, guru pendidik khusus (GPK)/guru *shadow* bukanlah asisten anak di sekolah yang bertugas membantu anak dalam segala hal, namun guru kelas tetap mempunyai wewenang penuh di kelasnya, serta bertanggung jawab atas terlaksananya peraturan yang berlaku. Adapun tugas-tugas guru *shadow*, meliputi:

- a) Menjembatani instruksi antara guru dan anak.
- b) Mengendalikan perilaku anak di kelas.
- c) Membantu anak untuk tetap berkonsentrasi belajar.
- d) Membantu anak dalam berinteraksi dengan orang lain.
- e) Menjadi media informasi antara guru dan orang tua dalam membantu anak mengejar ketinggalan pelajaran di kelasnya.⁶⁶

⁶⁵ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pedoman Manajemen*, 19-20.

⁶⁶ Mudjito, dkk, *Pendidikan Anak Autis* (t.k.: t.p., t.t.), 120.

Dengan demikian, adanya pendidikan inklusif yang mengkolaborasikan antara guru kelas, guru bidang studi, dan guru *shadow* dapat menghapuskan diskriminasi pelayanan pendidikan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus dan mengoptimalkan potensi diri mereka.

c. Proses Pembelajaran (*Learning Teaching Process*)

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan dari sistem pembelajaran yang komponennya meliputi tujuan pembelajaran, bahan ajar/materi pelajaran, metode dan media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Komponen-komponen tersebut telah tersusun rapi dalam pedoman kurikulum dan perangkat pembelajaran.

Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusif ialah kurikulum modifikasi/diversifikasi kurikulum, yakni kurikulum yang disesuaikan, diperluas, serta diperdalam kompetensi dan materi pelajarannya dalam rangka melayani keberagaman penyelenggaraan satuan pendidikan, kebutuhan, serta kemampuan daerah dan sekolah ditinjau dari budaya, geografis, kemampuan, kebutuhan, minat, serta potensi peserta didik.⁶⁷

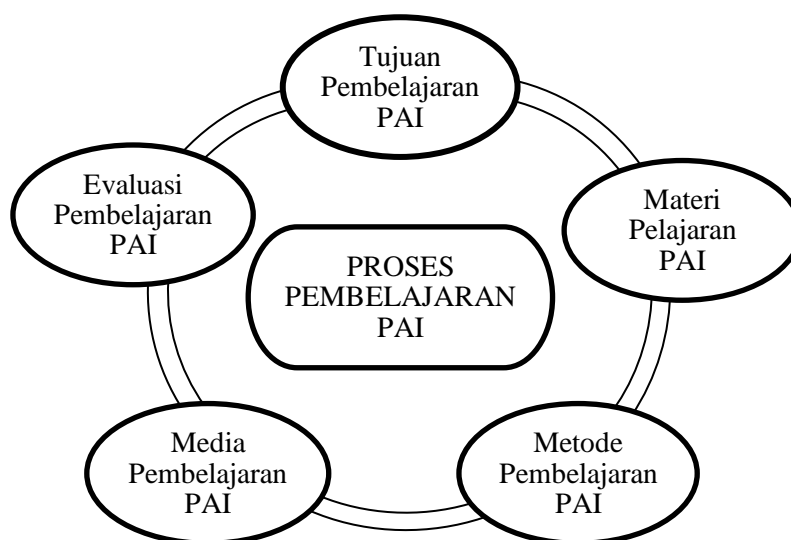
Perangkat pembelajaran di sekolah inklusif sama halnya dengan yang diaplikasikan pada sekolah reguler, yakni PROTA, PROMES, RPP, dan KKM. Bedanya, terdapat RPP modifikasi dan PPI (Program Pembelajaran Individual).

Program pembelajaran individual (PPI) merupakan rencana pembelajaran yang dirancang secara individual untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. PPI harus bersifat dinamis, yakni sensitif

⁶⁷ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pengembangan Kurikulum*, 2.

terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik. Idealnya, PPI disusun oleh sebuah tim yang terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, tenaga ahli, wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidik khusus (GPK)/guru *shadow*, dan peserta didik terkait.⁶⁸

Adapun komponen-komponen dari proses pembelajaran PAI dibingkai sebagaimana bagan di bawah ini.



Gambar 2.4

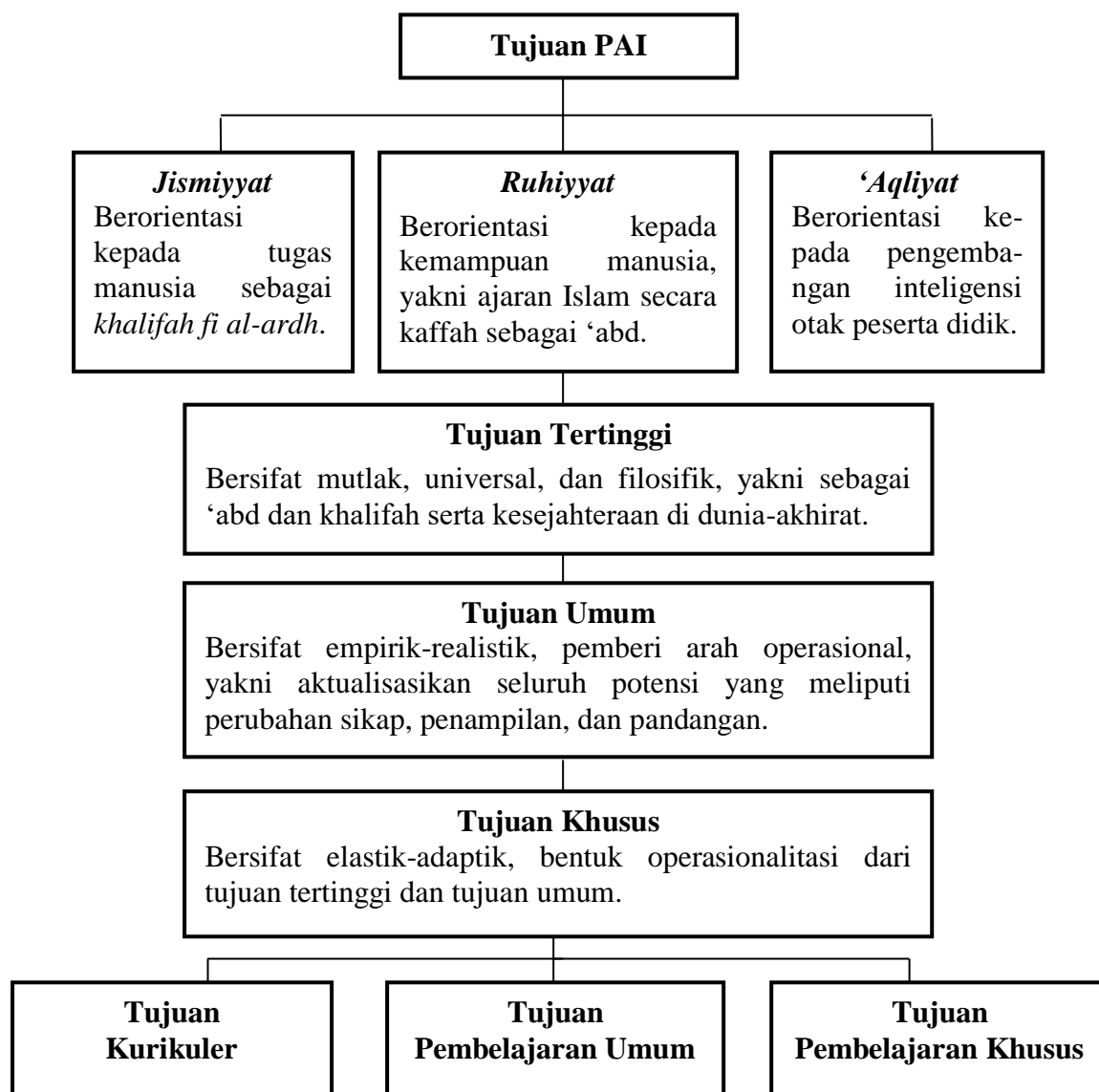
Bagan komponen proses pembelajaran PAI dalam *setting* inklusif

1) Tujuan pembelajaran PAI

Tujuan merupakan sasaran akhir dari setiap kegiatan pembelajaran dan merupakan sebuah *output* yang dapat dicapai atau ditingkatkan sebagai hasil dari kegiatan belajar mengajar. Tujuan pembelajaran memiliki tiga dimensi/ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiganya menggambarkan perubahan

⁶⁸ Ibid., 6.

perilaku peserta didik sebagai hasil dari kegiatan belajar.⁶⁹ Adapun formulasi tujuan pendidikan agama Islam diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yakni *jismiyyat*, *ruhiyyat*, dan *'aqliyat*.⁷⁰



Gambar 2.5

Bagan formulasi tujuan pendidikan agama Islam

2) Bahan ajar atau materi pelajaran PAI

⁶⁹ Nurul Zuriyah dan Hari Sunaryo, *Inovasi Model Pembelajaran Demokratis* (Malang: UMM Press, 2008), 15.

⁷⁰ Nusa dan Santi, *Penelitian Kualitatif PAI*, 4.

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.⁷¹ Sedangkan materi pelajaran (*learning materials*) adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar guna mencapai standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu.⁷²

Terdapat tiga kegiatan utama guru dalam modifikasi bahan ajar pendidikan inklusif, yaitu menyeleksi bahan ajar yang tepat bagi siswa berkebutuhan khusus, mengorganisasi bahan ajar dengan tata urutan tertentu, dan mensintesa bahan ajar yang telah tersusun agar dapat dipadukan dan diintegrasikan dalam keseluruhan proses pembelajaran di kelas umum.⁷³

Spesifik pada materi pelajaran PAI meliputi tujuh unsur pokok, yakni: keimanan, ibadah, al-Qur'an, akhlak, muamalah, syariah, dan tarikh.⁷⁴ Adapun ruang lingkup kandungan materi PAI ialah meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam.⁷⁵

3) Strategi dan metode pembelajaran PAI

⁷¹ Niko Perlambang Agung, dkk, "Pengembangan Bahan Ajar PAI." Makalah disajikan dalam seminar perkuliahan Teknologi Pembelajaran PAI, Pascasarjana STAIN Kediri, 3 Mei 2014.

⁷² Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain*, 141.

⁷³ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Model Modifikasi Bahan Ajar* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 8.

⁷⁴ Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, 104-105.

⁷⁵ Munjin dan Lilik, *Metode dan Teknik*, 10-13.

Pada dasarnya strategi pembelajaran memiliki perberbedaan dengan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran masih bersifat konseptual dan untuk merealisasikannya digunakan metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan *a plan of operation achieving something*, sedangkan metode adalah *a way in achieving something*.⁷⁶

Strategi pembelajaran yang dapat menjamin tercapainya manfaat yang diperlukan, antara lain:

- a) Penggunaan metodologi yang tepat
- b) Pembelajaran berbasis siswa (*student based learning*)
- c) Mengacu pada tujuh pilar pembelajaran UNESCO [*learning how to know/think* (belajar mengetahui/berpikir), *learning how to learn* (belajar bagaimana belajar), *learning how to do* (belajar berbuat), *learning how to live together* (belajar hidup bersama), *learning how to be* (belajar menjadi diri sendiri), *learning how to have a mastery of local* (belajar menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal), dan *learning how to understand the nature/god made* (belajar memahami lingkungan sekitar)].⁷⁷

Sedangkan penggunaan metode pembelajaran memiliki beberapa prinsip, yaitu individualitas, kebebasan, lingkungan, globalisasi, minat, aktivitas, motivasi, korelasi dan konsentrasi.⁷⁸

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusif lebih mengutamakan metode pembelajaran yang bersifat kooperatif dan

⁷⁶ Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran PAI*, 164.

⁷⁷ Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), 39.

⁷⁸ Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran PAI*, 166-167.

partisipatif, memberi kesempatan yang sama dengan siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kolaborasi antara guru pembimbing khusus (GPK) dan guru kelas, serta dengan menggunakan media, sumber daya, dan lingkungan yang beragam sesuai dengan keadaan.⁷⁹

Seperti halnya metode pembelajaran yang diterapkan pada mata pelajaran lainnya, ada beragam metode yang dapat digunakan pada pembelajaran PAI di kelas inklusif, di antaranya adalah metode ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi atau bermain peran (sosiodrama, psiko-drama, dan *role playing*), dan proyek.⁸⁰

4) Media pembelajaran PAI

Media pembelajaran⁸¹ adalah seluruh alat dan bahan baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. *Hardware* adalah alat-alat yang dapat mengantarkan pesan seperti buku, proyektor, radio, televisi, komputer, dan sebagainya. Sedangkan *software* adalah isi program yang mengandung pesan, seperti

⁷⁹ Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 174.

⁸⁰ Lihat selengkapnya dalam Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran PAI*, 167-183.

⁸¹ Secara umum, ada empat landasan penggunaan media pembelajaran, yaitu filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. (1) Landasan filosofis, yaitu penggunaan media atau teknologi dengan mengacu pada pendekatan humanis yakni menghargai martabat siswa karena mereka dibebaskan memilih media pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya sehingga tidak akan terjadi dehumanisasi; (2) Landasan psikologis, yaitu memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses pembelajaran serta memahami makna persepsi siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (3) Landasan teknologis, yaitu proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol; dan (4) Landasan empiris, yaitu berdasarkan pada temuan-temuan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Lihat Ani Mar'atul Hamidah, dkk, "Implementasi Teknologi Pembelajaran PAI di SMP/MTS." Makalah disajikan dalam seminar perkuliahan Teknologi Pembelajaran PAI, Pascasarjana STAIN Kediri, 7 Juni 2014.

informasi yang terdapat pada buku, pesan yang terkandung dalam film, materi yang disuguhkan melalui bagan, dan sebagainya.⁸²

Ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran PAI, antara lain:

- a) Jenis kemampuan yang akan dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Kegunaan dari berbagai jenis media yang dipilih tersebut.
- c) Kemampuan dan kesanggupan dalam menggunakannya.
- d) Fleksibilitas/luwes, daya tahan, kenyamanan, dan kemanfaatan.
- e) Keefektifan media yang dipilih untuk digunakan dalam pembelajaran PAI dibandingkan dengan media lain.⁸³

Media pembelajaran yang akan digunakan untuk kelas inklusif tentunya perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a) Kegunaan media untuk memotivasi belajar peserta didik dan sebagai wahana interaksi peserta didik dengan lingkungannya.
- b) Kemampuan yang dimiliki pendidik sebagai fasilitator untuk menyampaikan pesan atau materi pelajaran melalui media pendidikan yang digunakannya.
- c) Kemungkinan peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minat mereka melalui media pendidikan tersebut.⁸⁴

⁸² Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran PAI*, 184-185.

⁸³ Mukhtar, *Desain Pembelajaran PAI*, 116.

⁸⁴ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Model Media Pendidikan Inklusi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 25.

Dengan demikian, penggunaan media yang bervariasi dan tetap mempertimbangkan aspek-aspek di atas dapat menjadikan pembelajaran PAI berlangsung secara efisien dan efektif, serta mengurangi hambatan-hambatan dalam pembelajaran PAI, seperti kurangnya motivasi siswa dalam belajar PAI, partisipasi siswa yang cenderung minim ketika pembelajaran PAI berlangsung, dan kesulitan yang dialami guru dalam menyampaikan materi PAI.

5) Evaluasi pembelajaran PAI

Evaluasi pembelajaran ialah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Selain itu, proses evaluasi juga digunakan untuk membuat keputusan.⁸⁵ Sedangkan evaluasi pendidikan agama Islam adalah cara/teknik penilaian terhadap anak didik berdasarkan perhitungan komprehensif dari seluruh aspek kehidupan mental, psikologis, dan spiritual/religius. Teknik ini mempertimbangkan bahwa manusia merupakan pribadi yang tidak hanya religius, melainkan juga berilmu, terampil, serta sanggup beramal dan berbakti kepada Allah dan masyarakat.⁸⁶

Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan evaluasi di kelas inklusif adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penilaian selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan seusainya melalui lisan, tertulis, maupun pengamatan.

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 3.

⁸⁶ Munjin dan Lilik, *Metode dan Teknik*, 158.

- b) Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, penilaian dilakukan dengan membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan prestasi sebelumnya.
- c) Mengadakan tindak lanjut evaluasi dalam bentuk remedial atau pengayaan.⁸⁷

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, guru mendokumentasikannya di dalam sebuah buku rapor yang merupakan laporan kemajuan belajar siswa dan sebagai sarana komunikasi serta bentuk kerja sama antara sekolah, siswa dan orang tua. Bagi siswa program inkusif, komponen isi rapor terdiri dari hal-hal berikut:

- a) Identitas sekolah dan siswa yang bersangkutan.
- b) Petunjuk penggunaan rapor dan keterangan nilai.
- c) Akademis, yakni macam satuan pelajaran sesuai dengan satuan pendidikan, kompetensi, nilai angka, nilai huruf, rata-rata kelas, dan deskripsi nilai mata pelajaran.
- d) Program khusus, yakni hasil evaluasi program pembelajaran individual (PPI) yang bersifat non akademis dan disesuaikan dengan jenis kelainan serta kebutuhan khusus siswa pada periode tertentu dan penjabaran mengenai kondisi siswa selama pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, kesesuaian metode yang digunakan, dan keberhasilan ataupun kegagalan program yang dialami.

⁸⁷ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Kegiatan Belajar Mengajar* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 4.

- e) Ekstra kurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah dengan pertimbangan bakat, minat, dan keterampilan untuk menunjang *life skill* peserta didik.
- f) Pengembangan diri dan pembiasaan yang meliputi kedisiplinan dan tanggung jawab, kebersihan dan kerapian, kerja sama, kesopanan, kemandirian, kerajinan, kejujuran, dan lain-lain.⁸⁸

Sistem kenaikan kelas bagi peserta didik pada sekolah inklusif merujuk pada jenis kurikulum yang diikuti, sistem penilaian yang dipergunakan, serta pertumbuhan dan perkembangan psikososial peserta didik. Ada dua model sistem kenaikan kelas yang diaplikasikan di sekolah inklusif, antara lain:

- a) Model kenaikan kelas berdasarkan tingkat kecerdasan mental (*mental age*), yaitu tingkat ketuntasan pencapaian kompetensi belajar sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan.
- b) Model kenaikan kelas berdasarkan usia kalender peserta didik (*cronological age*), yaitu sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan kematangan sosial psikologis peserta didik secara otomatis (*otomatic promotion*).⁸⁹

Jadi, dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa evaluasi pembelajaran PAI dalam *setting* inklusif adalah beragam cara atau teknik penilaian dalam rangka pengumpulan data untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran PAI yang ditinjau

⁸⁸ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Model Laporan Hasil Belajar* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 4-6.

⁸⁹ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Penilaian* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 41.

dari segala aspek. Selain itu, juga digunakan untuk membuat keputusan penentuan langkah tindak lanjut bagi siswa berkebutuhan khusus yang bersangkutan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut didokumentasikan di dalam sebuah rapor inklusif.

d. Lingkungan (*Enviroment*)

Lingkungan merupakan tempat siswa dididik, suasana dan iklim belajar. Lingkungan yang kondusif, demokratis dan Islami diharapkan mampu mencapai hasil belajar yang optimal serta mengoptimalkan pembentukan kepribadian dan kreativitas peserta didik.⁹⁰

Komponen lingkungan belajar dimaknai sebagai situasi buatan atau kealaman, yakni berupa lingkungan fisik maupun sosial yang mampu berkontribusi bagi terselenggaranya proses pembelajaran. Suasana lingkungan belajar juga harus mampu mewarnai kelas menjadi ajang dialog, keterbukaan, toleransi, kritis, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip manusiawi, empati, adil, demokratis, dan religius.⁹¹

Lingkungan sekitar juga sangat menentukan bagi keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam menjalankan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun pihak-pihak yang sangat berperan bagi pelaksanaan pendidikan inklusif adalah:

1) Orang tua

Orang tua sangat berperan bagi peningkatan motivasi dan kepercayaan diri anak, sehingga orang tua dituntut dapat berpartisipasi aktif dalam pendidikan anaknya. Selain itu, orang tua

⁹⁰ Munjin dan Lilik, *Metode dan Teknik*, 24.

⁹¹ Zuriyah dan Sunaryo, *Inovasi Model Pembelajaran*, 17.

juga harus berkomunikasi dan berkonsultasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar anaknya kepada pihak sekolah, serta berkolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar anaknya dan mengembangkan potensinya melalui program lain di luar sekolah.

2) Sekolah inklusif

Pihak sekolah inklusif dituntut mampu berperan sebagai pusat sumber guna membantu melayani kebutuhan informasi dan konsultasi tentang pendidikan inklusif, memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan layanan pembelajarannya, serta mengurus pengadaan guru khusus, sosialisasi, dan pendampingan.

3) Pemerintah

Peran penting pemerintah dalam pendidikan inklusif, yakni membantu merumuskan kebijakan-kebijakan internal sekolah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui berbagai pelatihan di bidang inklusi, menyediakan guru khusus, memberikan subsidi berupa bantuan anggaran khusus dan dalam pengadaan media, alat, dan sarana khusus yang dibutuhkan sekolah, program pendampingan, monitoring, dan evaluasi program, serta sosialisasi ke masyarakat luas.⁹²

e. Faktor Pendukung (*Instrumental Input*)

Faktor pendukung adalah sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung iklim belajar siswa. Instrumen ini berupa fasilitas dan sumber belajar yang tersedia, seperti buku-buku pelajaran, alat-alat

⁹² Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 184.

peraga, laboratorium, sarana tempat beribadah, dan fasilitas lainnya yang dengan sengaja dirancang dan dimanipulasi guna pengkondisian siswa dan mewujudkan anak didik sesuai dengan yang diharapkan.⁹³

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif yang membutuhkan kerja keras dari para pemerhati pendidikan untuk mengupayakan fasilitas pendukung yang mampu mendorong peningkatan kualitas anak berkebutuhan khusus dengan disesuaikan pada tuntutan kurikulum yang telah dimodifikasi.⁹⁴

Beberapa manfaat yang dipetik dari sumber pembelajaran, yaitu: (1) Memberikan pengalaman belajar yang konkrit kepada siswa; (2) Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan keadaan; (3) Memberi informasi dengan jelas, teliti, dan terbaru; (4) Menambah cakrawala pesan/informasi pembelajaran di kelas; (5) Membantu memecahkan masalah pembelajaran; (6) Memberi motivasi yang positif; serta (7) Merangsang siswa untuk berfikir, bersikap, dan berkembang.⁹⁵

Selain sarana dan prasarana, instrumen pendukung pendidikan inklusif yang sangat urgen adalah dana atau biaya. Komponen biaya merupakan komponen produksi, sehingga perlu dialokasikan dana khusus guna memenuhi keperluan berikut:

- 1) Kegiatan identifikasi dan assesmen siswa berkebutuhan khusus.
- 2) Modifikasi kurikulum.
- 3) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat.

⁹³ Munjin dan Lilik, *Metode dan Teknik*, 24-25.

⁹⁴ Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 186.

⁹⁵ Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran PAI*, 190-191.

- 4) Pengadaan sarana dan prasarana.
- 5) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran.⁹⁶

f. *Output*

Output adalah keluaran atau bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi pembelajaran di sekolah.⁹⁷ *Output* merupakan hasil dari sebuah sistem. Kaitan dalam hal ini, diharapkan *output* dari serangkaian sistem pembelajaran PAI adalah mampu menjadikan anak didik sebagai pribadi yang shaleh setelah melakukan ikhtiar yang sungguh-sungguh.⁹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dalam *setting* inklusif memiliki ruang lingkup, antara lain: *input*, tenaga pendidik, proses pembelajaran PAI, lingkungan, faktor pendukung, serta *output*. Adapun pendesksiannya yakni bermula dari *input* yang kemudian tenaga pendidik memprosesnya dalam kegiatan pembelajaran dengan komponennya yang meliputi tujuan, bahan ajar, metode, media dan evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan di lingkungan yang kondusif, demokratis, dan Islami serta ditunjang oleh faktor-faktor pendukung iklim belajar siswa, seperti sarana prasarana dan dana yang mumpuni. Dengan demikian, akan tercipta hasil (*output*) yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI dan mampu mengoptimalkan potensi mereka dalam bidang PAI.

⁹⁶ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pedoman Manajemen*, 10.

⁹⁷ Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, 3-4.

⁹⁸ Munjin dan Lilik, *Metode dan Teknik*, 24.